



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KABUPATEN ROKAN HULU TA.2023

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2022

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 32/KSB/X/2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

NOMOR : 23/DPRD-NK/X/2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
Jabatan : Bupati Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

b. Nama : Nono Patria Pratama, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

c. Nama : Hardi Chandra
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

d. Nama : Andrizal
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

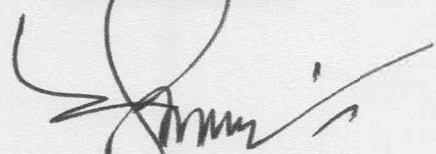
Pasir Pengaraian, 24 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si
KETUA

PIHAK KESATU



H. SUKIMAN

NONO PATRIA PRATAMA, SE
WAKIL KETUA

HARDI CHANDRA
WAKIL KETUA



ANDRIZAL
WAKIL KETUA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
BUPATI ROKAN HULU
DENGAN
KETUA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 33/BA/X/2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

NOMOR : 24/DPRD-BA/X/2022
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023 YANG TIDAK
TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
Jabatan : Bupati Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,
selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

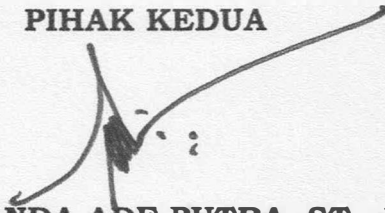
Berdasarkan hal tersebut di atas, guna meninjaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan

Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

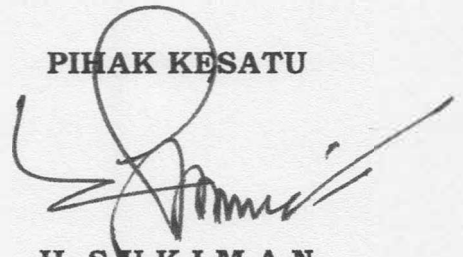
Pasir Pengaraian, 24 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si

PIHAK KESATU



H. S U K I M A N

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor : 33/BA/X/2022
 Nomor : 24/DPRD-BA/X/2022

No.	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi/Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
1.	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.3.28.0.00.09.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota			2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	357,492,100	393,241,310	432,565,441	
							2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416,912,500	458,603,750	504,464,125	
JUMLAH											774,404,600			

PIHAK KEDUA

NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si

PIHAK KESATU

H. S U K I M A N

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	2
Bab II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	4
2.1. Rencana Pendapatan Daerah.....	4
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	5
Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	7
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	7
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau	27
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah...	43
Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	45
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.....	45
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan	99
Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	100
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	100
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	100
Bab VI PENUTUP.....	101

Tabel 1.	Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	6
Tabel 2.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	8
Tabel 3.	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	28
Tabel 4.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	43
Tabel 5.	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	45
Tabel 6.	Rencana Belanja Daerah Tahun 2023	99
Tabel 7.	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023	100

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan OPD, program/kegiatan/sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing OPD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan penyusunan PPAS adalah :

- a. Menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- b. Menjelaskan sinergitas program Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Memperlihatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Prioritas Provinsi Riau;
- d. Menampilkan Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan indikator berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PPAS

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- x. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- y. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- z. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD TA.2023, maka target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dijelaskan sebagai berikut :

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu direncanakan sebesar Rp. 1,664,118,799,868, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 135,432,111,868, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1,528,686,688,000, Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,279,762,188,843, maka pendapatan pada tahun 2023 mengalami penambahan sebesar Rp. 384,356,611,025, atau 30,03%. Penambahan pendapatan ini disebabkan karena pada APBD Tahun Anggaran 2023 sudah menuangkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan transfer pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa sebagaimana yang tertuang didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2023, PAD ditargetkan sebesar Rp. 135,432,111,868.

2.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 60,500,298,828.

2.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (seperti sewa alat berat, jasa laboratorium, sewa aula dan jasa sewa alat alsintan), Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, serta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 13,227,813,040.

2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.153.000.000.

2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, dan Pendapatan BLUD.
Pada tahun 2023, penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 59.551.000.000.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari pendapatan transfer pada tahun 2023 untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 1,528,686,688,000. Secara rinci pendapatan transfer Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 terdiri dari :

2.1.2.1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa (DD). Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, ditargetkan sebesar Rp. 1,408,768,483,000.

2.1.2.2. Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp. 119,918,205,000, ini direncanakan bersumber dari penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Riau. Sedangkan untuk sumber penerimaan Bantuan Keuangan belum ditargetkan mengingat belum diterbitkannya dasar hukum dan kepastian atas sumber penerimaan tersebut.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Untuk tahun 2023, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 8,600,000,000, yang bersumber dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang tahun 2022.

Tabel 1.
Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD MURNI TA.2022	KUA TA.2023	SESLISIH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125,897,928,500	135,432,111,868	9,534,183,368
4.1.01	Pajak Daerah	53,338,000,000	60,500,298,828	7,162,298,828
4.1.02	Retribusi Daerah	10,855,928,500	13,227,813,040	2,371,884,540
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,153,000,000	2,153,000,000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59,551,000,000	59,551,000,000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,153,864,260,343	1,528,686,688,000	374,822,427,657
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,057,223,373,000	1,408,768,483,000	351,545,110,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96,640,887,343	119,918,205,000	23,277,317,657
	Jumlah Pendapatan	1,279,762,188,843	1,664,118,799,868	384,356,611,025

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah serta untuk mewujudkan adanya sinergitas program pembangunan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan ketujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023 tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah merumuskan kedalam beberapa program pembangunan, yaitu sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 2.

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif		
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)		
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial		
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)		
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan kerja		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman di Konsumsi oleh Masyarakat		
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Bumdesa yang berkembang		
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
			Persentase peningkatan status desa mandiri		
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase PKK aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase LPM Berprestasi		
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Jumlah UMKM yang dibina		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dikelola		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Produksi Padi		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
			Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani yang dibina		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Jumlah Kelompok Tani Peternak Perkebunan yang dibina		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7.4.2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		
			Badan Pendapatan Daerah		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Badan Pendapatan Daerah		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Badan Pendapatan Daerah		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase PAD Terhadap Total (Pendapatan		
			Badan Pendapatan Daerah		
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Lingkungan Hidup		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)		
			Dinas Lingkungan Hidup		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Peningkatan Indeks Kualitas Air, Peningkatan Indeks Kualitas Udara, Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
			Dinas Lingkungan Hidup		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti		
			Dinas Lingkungan Hidup		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase jumlah sampah yang tertangani		
			Dinas Lingkungan Hidup		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
			Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
			Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
			Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penyediaan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di fasilitas kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase TFR (Total Fertility Rate)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase wirausaha muda		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase pemenuhan hak anak		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan Penerbitan KTP-Elektronik		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Jumlah sejarah yang didokumentasikan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			100%		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan Terhadap RTRW		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Jumlah Izin penerbitan pembangunan dan pengembangan perumahan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7.4.2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor		
				Dinas Perhubungan	
			Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/ bandara pertahun		
				Dinas Perhubungan	
			Rasio Ijin Trayek		
				Dinas Perhubungan	
			Rasio konektivitas kabupaten		
				Dinas Perhubungan	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7A.2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Anugerah keterbukaan informasi publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Keterbukaan Informasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase aduan masyarakat terlayani		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Presentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Proposi OPD yang melaksanakan SPBE		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Investor Berskala Nasional		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Izin yang diterbitkan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Data/informasi/ statistik yang terintegrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Presentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		
				Sekretariat Daerah	
			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Sekretariat Daerah	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Th. 2023
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Indeks Kinerja Kecamatan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Penetapan Produk Hukum		
				Sekretariat Daerah	
			Skor LPPD		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan keuangan yang difasilitasi		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	
			Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat DPRD	
			Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Realisasi Dana Mandatori dan Pembiayaan Daerah		
				Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Penetapan APBD Tepat Waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase penyelesaian tapal batas daerah		
			Sekretariat Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			INSPEKTORAT		
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			INSPEKTORAT		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			INSPEKTORAT		
			Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti		
			INSPEKTORAT		
			Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja		
			INSPEKTORAT		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)		
			INSPEKTORAT		
			Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)		
			INSPEKTORAT		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB		
			INSPEKTORAT		
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
			INSPEKTORAT		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Kecamatan Rambah		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Kecamatan Tambusai		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Kecamatan Tambusai		
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Kecamatan Tambusai		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Kecamatan Kepenuhan		
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Kecamatan Kepenuhan		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kunto Darussalam	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Kunto Darussalam	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Ujung Batu	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Ujung Batu	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Kabun	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Kabun	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tandun	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Tandun	

				Kecamatan Tandun	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rambah Samo	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Rambah Samo	
				Kecamatan Rambah Hilir	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rambah Hilir	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Rambah Hilir	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Bangun Purba	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Bangun Purba	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Kecamatan Bangun Purba	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tambusai Utara	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Tambusai Utara	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Pendalian IV Koto	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Pendalian IV Koto	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Bonai Darussalam	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Bonai Darussalam	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik		
				Kecamatan Rambah	
				Kecamatan Tambusai	
				Kecamatan Rokan IV Koto	
				Kecamatan Kepenuhan	
				Kecamatan Kunto Darussalam	
				Kecamatan Ujung Batu	
				Kecamatan Kabun	
				Kecamatan Tandun	
				Kecamatan Rambah Samo	
				Kecamatan Rambah Hilir	
				Kecamatan Bangun Purba	
				Kecamatan Tambusai Utara	
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
				Kecamatan Pendalian IV Koto	
				Kecamatan Bonai Darussalam	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kegiatan Kegiatan Masyrakat Terfasilitasi		
				Kecamatan Rambah	
			Persentase Kegiatan Pem,berdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
				Kecamatan Rambah	
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
				Kecamatan Tambusai	
				Kecamatan Rokan IV Koto	
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		
				Kecamatan Kepenuhan	
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
				Kecamatan Kepenuhan	
				Kecamatan Kunto Darussalam	
				Kecamatan Ujung Batu	
				Kecamatan Kabun	
				Kecamatan Tandun	
				Kecamatan Rambah Samo	
				Kecamatan Rambah Hilir	
				Kecamatan Bangun Purba	
				Kecamatan Tambusai Utara	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7.4.2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
				Kecamatan Pendalian IV Koto	
				Kecamatan Bonai Darussalam	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan		
				Kecamatan Kunto Darussalam	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Tambusai	
				Kecamatan Rokan IV Koto	
				Kecamatan Kabun	
				Kecamatan Rambah Samo	
				Kecamatan Rambah Hilir	
				Kecamatan Bangun Purba	
				Kecamatan Tambusai Utara	
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
				Kecamatan Bonai Darussalam	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu		
				Kecamatan Rambah	
				Kecamatan Rokan IV Koto	
				Kecamatan Kepenuhan	
				Kecamatan Kunto Darussalam	
				Kecamatan Ujung Batu	
				Kecamatan Kabun	
			0Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu		
				Kecamatan Rambah Samo	
			Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu		
				Kecamatan Rambah Hilir	
				Kecamatan Bangun Purba	
				Kecamatan Tambusai Utara	
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
				Kecamatan Kepenuhan Hulu	
				Kecamatan Bonai Darussalam	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Jumlah ORMAS dan LSM yang aktif		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tema pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke 4 (empat) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang dirumuskan kedalam 3 (tiga) prioritas daerah, yaitu :

- 1) Kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Pelayanan Publik;
- 3) Daya Saing Daerah.

Agar adanya keselaran kebijakan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan program pembangunan yang mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau pada program sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut :

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
59	Kesejahteraan Masyarakat				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		859.019.416.105
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		16.253.235.457
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
			Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs		
			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		151.895.169.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Kesehatan		149.626.122.858
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Kesehatan		149.626.122.858
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar		
			Dinas Kesehatan		64.396.920.368

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar Standar		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Persentase penyediaan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di fasilitas kesehatan		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD		
				Dinas Kesehatan	64.396.920.368
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi		
				Dinas Kesehatan	1.607.475.460
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman		
				Dinas Kesehatan	12.800.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)		
				Dinas Kesehatan	252.300.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.199.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.026.345.191
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)		
				Dinas Lingkungan Hidup	99.999.900
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Peningkatan Indeks Kualitas Air, Peningkatan Indeks Kualitas Udara, Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
				Dinas Lingkungan Hidup	546.899.700
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	32.000.200
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase jumlah sampah yang tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	5.786.730.730
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.065.224.738
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.354.073.713
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.419.298.451
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan Penerbitan KTP-Elektronik		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	459.376.550
			Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	459.376.550
			Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	459.376.550
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	374.484.750
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.820.207.408
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.194.692.158
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase TFR (Total Fertility Rate)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.693.600
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	682.014.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa Kencana)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.136.096.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	536.336.550
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	536.336.550
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	511.242.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Jumlah UMKM yang dibina		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	56.213.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase wirausaha muda		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	963.225.000
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	963.225.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.025.700.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
			Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan		
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	495.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
			Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	300.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
			Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	236.080.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
			Jumlah sejarah yang didokumentasikan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	149.798.000
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	162.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
			Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	121.957.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.464.451.678
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.464.451.678
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
			koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	314.647.934
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	314.647.934
			Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	246.943.400
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	2.079.672.700
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	568.709.900
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.817.112.465
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	210.800.800
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
			Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	251.263.100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2.899.683.990
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Jumlah ORMAS dan LSM yang aktif		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		231.186.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		163.345.900
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		506.033.600
61	Daya Saing Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.321.293.647
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		9.959.382.350
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.285.000.000
			Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7.946.939.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Presentase drainase dalam kondisi baik		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.850.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		60.077.171.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		535.376.300
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan Terhadap RTRW		
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.400.609.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan		
			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		549.999.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		3.242.059.192
			Dinas Perhubungan		2.993.453.064

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/ bandara pertahun		
			Dinas Perhubungan		40.203.000
			Rasio konektivitas kabupaten		
			Dinas Perhubungan		497.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		2.823.622.015
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		2.823.622.015
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		3.929.624.129
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		3.929.624.129
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dikelola		
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		1.896.585.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan		
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		234.990.780
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		2.509.671.179
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		1.266.501.923
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		6.053.801.371
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		728.598.800
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		300.412.950
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		3.600.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		251.473.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Produksi Padi		
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		599.891.300
			Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		105.653.000
			Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)		
			Dinas Peternakan dan Perkebunan		76.698.750
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.014.875.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	7.727.950.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	695.835.530
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	71.620.000
			Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	49.990.600
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	100.040.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani yang dibina		
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	510.140.000
			Jumlah Kelompok Tani Peternak Perkebunan yang dibina		
				Dinas Peternakan dan Perkebunan	180.749.500
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pasar rakyat yang ber kondisi baik		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.200.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	134.999.700
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.599.400
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	714.518.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	993.477.288
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	439.117.034
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	99.385.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Pendapatan Daerah	19.465.615.835
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Pendapatan Daerah	343.590.600
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Pendapatan Daerah	456.805.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase PAD Terhadap Total (Pendapatan		
			Badan Pendapatan Daerah		1.050.961.400
62	Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		100.000.000
			Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		3.549.133.200
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		3.549.133.200
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		400.000.000
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		400.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			100%		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		9.175.000.000
			Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		9.175.000.000
			Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		9.175.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		7.408.000
			Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		7.408.000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		1.177.418.100
			Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		16.032.000
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		4.013.214.190
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		9.928.891.505
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		654.079.830
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Jumlah Izin penerbitan pembangunan dan pengembangan perumahan		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		50.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	50.000.000
			Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	220.000.000
			Jumlah sosialisasi persiapan rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.084.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	220.000.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	35.612.706.430
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.335.956.810
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.335.956.810
			Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.000.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	370.640.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.031.288.638
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.489.521.800
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.499.629.000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.499.629.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Parsentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.030.200
			Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153.306.000
			Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.005.000
			Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.659.600
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	178.898.500
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		100.080.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			

			Dinas Lingkungan Hidup		774.404.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Perhubungan		26.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/ bandara pertahun		
			Dinas Perhubungan		18.050.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		4.178.475.982
			Presentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		4.178.475.982
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Anugerah keterbukaan informasi publik		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		3.228.480.491
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		3.228.480.491
			Keterbukaan Informasi		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		3.228.480.491
			Presentase aduan masyarakat terlayani		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		3.228.480.491
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SP8E)		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		1.375.600.000
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		1.200.000.000
			Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		1.200.000.000
			Presentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		1.200.000.000
			Proposi OPD yang melaksanakan SP8E		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		1.200.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.348.183.248
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Data/informasi/ statistik yang terintegrasi		
			Dinas Komunikasi dan Informatika		114.299.950

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Presentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	114.299.950
			Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	114.299.950
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	54.000.000
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	54.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	150.590.800
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga		
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.961.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		
				Sekretariat Daerah	520.057.400
			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Sekretariat Daerah	520.057.400
			Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
				Sekretariat Daerah	520.057.400
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Sekretariat Daerah	22.268.942.251
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Sekretariat Daerah	11.477.074.459
			Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, rumah tangga, protokol dan komunikasi pimpinan		
				Sekretariat Daerah	8.748.913.600
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Indeks Kinerja Kecamatan		
				Sekretariat Daerah	835.764.900
			Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan		
				Sekretariat Daerah	10.716.336.738
			Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
				Sekretariat Daerah	835.764.900
			Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif		
				Sekretariat Daerah	327.350.700
			Persentase Penetapan Produk Hukum		
				Sekretariat Daerah	719.200.000
			Skor LPPD		
				Sekretariat Daerah	835.764.900
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
				Sekretariat Daerah	541.781.100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu 7A.2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian		
				Sekretariat Daerah	247.418.900
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		
				Sekretariat Daerah	541.781.100
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama		
				Sekretariat Daerah	541.781.100
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah		
				Sekretariat Daerah	398.999.900
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		
				Sekretariat Daerah	541.781.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan keuangan yang difasilitasi		
				Sekretariat DPRD	1.166.180.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD		
				Sekretariat DPRD	9.689.234.916
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Sekretariat DPRD	3.374.328.318
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			0Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	10.587.600.000
			Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	9.844.789.000
			Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda		
				Sekretariat DPRD	8.305.808.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.012.675.636
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	731.187.200
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	671.931.036
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.068.328.400
			Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	272.075.000
			Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	449.482.600
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	576.603.100
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	660.035.900
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	716.440.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.482.199.921
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	621.056.350
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Realisasi Dana Mandatori dan Pembiayaan Daerah		
				Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	233.637.360.800
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.411.801.800
			Penetapan APBD Tepat Waktu		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.268.066.100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur		
				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	891.883.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.179.720.575
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	378.062.700
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.453.535.865
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal		
				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	222.245.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	771.935.500
			Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	719.698.980
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase penyelesaian tapal batas daerah		
				Sekretariat Daerah	108.592.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				INSPEKTORAT	9.444.846.439
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				INSPEKTORAT	500.839.230
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
				INSPEKTORAT	2.076.632.000
			Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti		
				INSPEKTORAT	2.076.632.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2023
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja		
				INSPEKTORAT	2.076.632.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)		
				INSPEKTORAT	707.060.000
			Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)		
				INSPEKTORAT	707.060.000
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB		
				INSPEKTORAT	707.060.000
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
				INSPEKTORAT	707.060.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rambah	2.946.833.078
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Tambusai	2.185.801.228
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rokan IV Koto	1.734.400
				Kecamatan Kepenuhan	1.153.600
				Kecamatan Kunto Darussalam	2.854.623.587
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Kunto Darussalam	46.105.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Ujung Batu	1.200.000

				Kecamatan Tandun	1.050.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rambah Samo	498.733.476
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Rambah Samo	23.698.850
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Rambah Hilir	1.010.000
				Kecamatan Bangun Purba	2.206.400
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		
				Kecamatan Bangun Purba	3.750.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Tambusai Utara	1.142.400
				Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.045.700
				Kecamatan Pendalian IV Koto	1.049.900
				Kecamatan Bonai Darussalam	1.136.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik		
				Kecamatan Rambah	15.924.000
				Kecamatan Kunto Darussalam	14.715.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu TA. 2023

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kegiatan Kegiatan Masyrakat Terfasilitasi		
			Kecamatan Rambah		203.566.000
			Persentase Kegiatan Pem,berdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
			Kecamatan Rambah		37.066.000
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		
			Kecamatan Kepenuhan		20.361.000
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi		
			Kecamatan Kunto Darussalam		155.000.000
			Kecamatan Kabun		18.429.000
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi		
			Kecamatan Kepenuhan Hulu		46.691.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan		
			Kecamatan Kunto Darussalam		100.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		
			Kecamatan Rambah		14.202.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu		
			Kecamatan Rambah		2.116.000
			Kecamatan Kunto Darussalam		14.000.000
			Kecamatan Kabun		8.400.000
			Kecamatan Kepenuhan Hulu		10.499.900
			Kecamatan Bonai Darussalam		8.640.000

3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Pada tahun 2023, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan
	SASARAN
	1 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
	2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
	ARAH KEBIJAKAN
	1 Menjamin Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
	2 Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah
	3 Menjamin Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
	4 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru
	5 Menjamin Ketersediaan dan Akses Fasilitas Kesehatan
	6 Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan
	SASARAN
	1 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
	2 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
	3 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	4 Meningkatnya investasi daerah
	5 Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah
	ARAH KEBIJAKAN
	1 Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
	2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
	3 Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
	4 Meningkatkan/ Mempertahankan Produksi Pertanian/ Perkebunan
	5 Mengembangkan Produk IKM & UMKM Lokal
	6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha
	7 Menjamin Distribusi Hasil Pertanian dan Perkebunan
	8 Meningkatkan pendapatan asli daerah
	9 Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
	10 Memperbaiki iklim dan promosi Investasi
	11 Menggerakkan Sektor Pariwisata Lokal
3	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
	SASARAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara
3	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air
4	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya
	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan
2	Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik
3	Pemenuhan Akses Jalan dan Jembatan Untuk Kawasan Pariwisata
4	Pemenuhan Akses Jalan dan Jembatan Untuk Wilayah Produksi Pertanian dan Perkebunan
5	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
6	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan
7	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
	SASARAN
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
3	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
2	Mendorong Berkembangnya Local Wisdom Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan
3	Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum
	SASARAN
1	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal
2	Meningkatnya penerapan e-government
3	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Publik Bagi Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3	Mendukung Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
4	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima
5	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERISIKAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SATUAN KERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DITUANGKAN SECARA DESKRIPTIF DAN DALAM BENTUK TABULASI.

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Rancangan Kebijakan Umum APBD TA.2023, Urusan dan unsur terkait penyelenggara urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dituangkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	592,964,107,481.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	589,931,494,981.00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	589,931,494,981.00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	437,636,325,781.00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	421,383,090,324.00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	421,383,090,324.00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,436,315,800.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,982,000.00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461,119,400.00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,818,400.00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	387,900,000.00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,500,000.00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449,996,000.00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,230,559,057.00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,500,000.00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211,866,107.00
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,304,150.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13,972,888,800.00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586,360,600.00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81,830,000.00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504,530,600.00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	152,295,169,200.00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92,117,735,000.00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	4,200,000,000.00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600,000,000.00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,923,941,000.00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14,184,428,000.00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3,274,246,000.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67,935,120,000.00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46,175,723,000.00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	200,000,000.00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6,899,073,000.00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	593,606,000.00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6,102,124,000.00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,284,800,000.00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27,096,120,000.00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14,001,711,200.00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,501,602,000.00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	400,000,000.00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	160,204,750.00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	360,000,000.00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	270,314,200.00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	61,790,250.00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11,217,800,000.00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	30,000,000.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,032,612,500.00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3,032,612,500.00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	963,225,000.00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	813,225,000.00
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	813,225,000.00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150,000,000.00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1,574,387,500.00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	548,687,500.00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	548,687,500.00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	600,000,000.00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	600,000,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	425,700,000.00
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	425,700,000.00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	495,000,000.00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	495,000,000.00
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	495,000,000.00
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	215,895,618,886.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	215,895,618,886.00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	215,895,618,886.00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149,626,122,858.00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,712,732.00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65,712,732.00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78,440,093,646.00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78,433,093,646.00
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000.00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,000,000.00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,797,910.00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,492,000.00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,000,000.00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,455,910.00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92,600,000.00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,250,000.00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,293,440.00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23,293,440.00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,667,225,535.00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,199,899,135.00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,457,326,400.00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512,999,600.00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,181,500.00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442,368,100.00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,450,000.00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	54,499,999,995.00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	54,499,999,995.00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64,396,920,368.00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,201,450,188.00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,850,000,000.00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,916,814,000.00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19,036,473,000.00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1,212,827,200.00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4,085,335,988.00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,000,000.00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,131,520,180.00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	113,957,200.00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	557,039,800.00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	86,085,000.00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	126,460,000.00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	85,200,000.00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27,540,920.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22,849,900.00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24,787,200.00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	38,819,800.00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	31,579,800.00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,950,000.00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32,150,000.00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5,250,000.00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	300,000,000.00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8,480,000.00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	85,312,200.00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	752,347,900.00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	119,790,000.00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	208,228,000.00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	162,460,000.00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9,927,704,500.00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	16,043,000.00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	18,440,000.00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	22,151,832,000.00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	548,652,020.00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	54,150,000.00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	58,688,000.00
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	544,722,940.00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	63,950,000.00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	26,750,000.00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	37,200,000.00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,607,475,460.00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10,380,000.00
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10,380,000.00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	11,580,000.00
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,580,000.00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,585,515,460.00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,585,515,460.00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	12,800,000.00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12,800,000.00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12,800,000.00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	252,300,200.00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	252,300,200.00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	252,300,200.00
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,425,771,297.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96,425,771,297.00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96,425,771,297.00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,330,675,997.00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,062,000.00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,516,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,030,000.00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,516,000.00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,350,476,597.00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,345,444,597.00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,516,000.00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,516,000.00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,960,755,050.00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,332,000.00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,288,400.00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	940,064,650.00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,000,000.00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,015,000.00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	808,055,000.00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,616,214,250.00
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700,000,000.00
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650,000,000.00
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	161,900,000.00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104,314,250.00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,576,802,500.00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179,367,300.00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,387,435,200.00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,766,365,600.00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,436,000.00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,482,329,600.00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113,600,000.00
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,231,939,000.00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,946,939,000.00
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	300,000,000.00
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	300,000,000.00
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2,015,000,000.00
1.03.02.2.01.20	Rehabilitasi Bendungan	350,000,000.00
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	200,000,000.00
1.03.02.2.01.45	Revitalisasi Danau	200,000,000.00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	3,900,000,000.00
1.03.02.2.01.48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	500,000,000.00
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	181,939,000.00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,285,000,000.00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200,000,000.00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	850,000,000.00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,235,000,000.00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,850,000,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,850,000,000.00
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2,350,000,000.00
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500,000,000.00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60,077,171,000.00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	60,077,171,000.00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	600,000,000.00
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600,000,000.00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3,700,000,000.00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	20,897,301,000.00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	5,960,000,000.00
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2,875,000,000.00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	15,945,670,000.00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7,250,000,000.00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500,000,000.00
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1,000,000,000.00
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	49,200,000.00
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	700,000,000.00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	535,376,300.00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	387,176,300.00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	175,021,100.00
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	42,629,000.00
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	63,243,200.00
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	57,183,000.00
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	49,100,000.00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	97,300,000.00
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	50,000,000.00
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	47,300,000.00
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	50,900,000.00
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	50,900,000.00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,400,609,000.00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	847,920,000.00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	800,000,000.00
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	47,920,000.00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	193,637,000.00
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	143,637,000.00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50,000,000.00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150,200,000.00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	115,200,000.00
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	35,000,000.00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	208,852,000.00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	208,852,000.00
1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	70,468,635,287.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	70,368,555,287.00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13,224,133,200.00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100,000,000.00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
1.03.02.2.01.23	Rehabilitasi Unit Air Baku	100,000,000.00

1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3,549,133,200.00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3,549,133,200.00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,855,633,200.00
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	200,000,000.00
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1,493,500,000.00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	400,000,000.00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000.00
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	200,000,000.00
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	100,000,000.00
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100,000,000.00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9,175,000,000.00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9,175,000,000.00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100,000,000.00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8,665,000,000.00
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	50,000,000.00
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	40,000,000.00
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	20,000,000.00
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	57,144,422,087.00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,876,631,657.00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,408,000.00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,512,000.00
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,896,000.00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,089,380,032.00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,079,588,032.00
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,896,000.00
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,896,000.00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,240,000.00
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6,240,000.00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,013,214,190.00
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000.00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,120,600.00
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,443,000,690.00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,210,400.00
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,998,500.00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461,884,000.00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654,079,830.00
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	135,418,400.00
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172,661,430.00
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96,000,000.00
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250,000,000.00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,928,891,505.00
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,966,186,905.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,952,704,600.00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,177,418,100.00
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63,500,000.00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	924,521,100.00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189,397,000.00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	335,084,000.00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000.00
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	15,000,000.00
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	20,000,000.00
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	15,000,000.00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15,084,000.00
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	15,084,000.00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	220,000,000.00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100,000,000.00
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	120,000,000.00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50,000,000.00
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50,000,000.00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	220,000,000.00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	220,000,000.00
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	100,000,000.00
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	120,000,000.00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100,000,000.00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100,000,000.00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	35,612,706,430.00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35,612,706,430.00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35,612,706,430.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100,080,000.00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100,080,000.00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100,080,000.00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,080,000.00
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50,080,000.00
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17,488,916,420.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17,488,916,420.00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17,488,916,420.00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,543,177,920.00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,375,800.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,394,800.00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	981,000.00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,045,102,610.00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,044,397,010.00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	705,600.00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373,883,000.00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,226,000.00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,993,600.00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,996,000.00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,043,400.00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,240,000.00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283,384,000.00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109,957,550.00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,957,550.00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657,928,800.00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,800,000.00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,680,000.00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564,448,800.00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353,930,160.00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,048,240.00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296,481,920.00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,400,000.00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,314,670,500.00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,997,588,400.00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	58,406,400.00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	541,125,000.00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	7,398,057,000.00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	317,082,100.00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	101,572,000.00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30,999,800.00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	184,510,300.00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,631,068,000.00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,586,178,000.00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,234,185,000.00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	351,993,000.00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	44,890,000.00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	33,240,000.00
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11,650,000.00
1.05.3.28.2.11.06.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,384,451,238.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,384,451,238.00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,384,451,238.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,918,450,438.00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000.00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000.00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,026,288,638.00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,021,288,638.00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000.00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,500,000.00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370,640,000.00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,925,000.00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,500,000.00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,690,000.00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,925,000.00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283,600,000.00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,000,000.00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,000,000.00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945,482,800.00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,596,000.00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,000,000.00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857,886,800.00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544,039,000.00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384,039,000.00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	466,000,800.00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	56,030,200.00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	56,030,200.00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	153,306,000.00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50,051,200.00
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	103,254,800.00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	136,659,600.00
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12,000,000.00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13,001,600.00
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	61,630,000.00
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50,028,000.00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	120,005,000.00
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	55,001,000.00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65,004,000.00
1.06.2.08.0.00.07.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10,083,500,578.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,307,215,478.00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8,307,215,478.00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,570,799,428.00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,500,000.00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,750,000.00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,750,000.00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,708,948,353.00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,708,948,353.00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,250,000.00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25,250,000.00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570,560,300.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,154,000.00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,336,000.00
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,760,000.00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,358,500.00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70,375,800.00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380,576,000.00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600,615,285.00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,950,000.00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,999,685.00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562,665,600.00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659,925,490.00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56,101,600.00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	487,252,000.00
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30,000,000.00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,571,890.00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000.00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,145,380,150.00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19,759,600.00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	19,759,600.00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,125,620,550.00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	112,878,000.00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58,744,800.00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	871,999,850.00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43,411,200.00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38,586,700.00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	817,630,400.00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	389,760,800.00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	160,426,400.00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	17,798,400.00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	211,536,000.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	427,869,600.00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	407,869,600.00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20,000,000.00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,406,184,700.00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	102,260,000.00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	102,260,000.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,303,924,700.00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	674,001,500.00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	510,000,000.00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	119,923,200.00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	367,220,800.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	367,220,800.00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	367,220,800.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,776,285,100.00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,776,285,100.00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	544,227,900.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
	PEREMPUAN	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	148,094,500.00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	148,094,500.00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	246,802,400.00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	246,802,400.00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149,331,000.00
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149,331,000.00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	65,177,500.00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42,098,500.00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42,098,500.00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23,079,000.00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23,079,000.00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	98,090,200.00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,090,200.00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48,307,500.00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49,782,700.00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	390,208,500.00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115,273,000.00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115,273,000.00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	274,935,500.00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42,834,500.00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,658,000.00
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	182,443,000.00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	678,581,000.00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	144,172,000.00
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144,172,000.00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	534,409,000.00
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000.00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	464,409,000.00
2.09.3.25.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6,498,455,720.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,204,337,320.00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5,204,337,320.00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,330,083,420.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,199,000.00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,199,000.00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,980,070,200.00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,980,070,200.00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447,944,400.00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,178,000.00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,947,300.00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,294,800.00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,447,300.00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330,077,000.00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,650,000.00
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18,650,000.00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592,051,700.00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,300,000.00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,319,700.00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	552,432,000.00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,168,120.00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54,833,720.00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224,134,400.00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,200,000.00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	864,253,900.00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	467,269,900.00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	29,992,000.00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	412,499,900.00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	24,778,000.00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	396,984,000.00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	396,984,000.00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10,000,000.00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1,294,118,400.00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,294,118,400.00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	150,000,000.00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	150,000,000.00
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	150,000,000.00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	751,141,500.00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	751,141,500.00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	751,141,500.00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	392,976,900.00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	392,976,900.00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	392,976,900.00
2.11.3.28.0.00.09.0000	Dinas Lingkungan Hidup	12,266,380,321.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12,266,380,321.00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12,266,380,321.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,026,345,191.00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,500,000.00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000.00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,000,000.00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,862,017,226.00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,862,017,226.00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468,570,800.00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,999,400.00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,284,000.00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58,766,400.00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,885,000.00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,636,000.00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142,600,000.00
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30,600,000.00
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,000,000.00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,023,191,365.00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,360,000.00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155,311,365.00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	860,520,000.00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521,465,800.00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,624,600.00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419,941,200.00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,900,000.00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	874,404,500.00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	99,999,900.00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	99,999,900.00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	774,404,600.00
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	357,492,100.00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	416,912,500.00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	546,899,700.00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	546,899,700.00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	106,303,400.00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	440,596,300.00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	32,000,200.00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	32,000,200.00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	32,000,200.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,786,730,730.00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5,786,730,730.00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,687,738,730.00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	98,992,000.00
2.12.0.00.0.00.10.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,878,675,001.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10,878,675,001.00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,878,675,001.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,419,298,451.00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,601,160,638.00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,601,160,638.00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86,200,000.00
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86,200,000.00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,377,864,100.00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,996,300.00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	788,427,000.00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,910,800.00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162,570,000.00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,968,000.00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369,992,000.00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,600,000.00
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	29,600,000.00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,000,730,213.00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,999,013.00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875,731,200.00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323,743,500.00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,434,000.00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142,440,000.00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129,869,500.00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	459,376,550.00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	459,376,550.00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	459,376,550.00
2.13.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6,640,585,502.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6,640,585,502.00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,640,585,502.00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,028,919,852.00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,728,800.00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,728,800.00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,787,345,210.00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,787,345,210.00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450,739,575.00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,588,175.00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,708,000.00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,075,800.00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,940,600.00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,427,000.00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355,246,860.00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,994,060.00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301,252,800.00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403,859,407.00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,302,000.00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303,489,000.00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,068,407.00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,650,947,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,650,947,000.00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	104,757,300.00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	145,293,000.00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	43,622,000.00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1,129,426,400.00
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	77,848,500.00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	149,999,800.00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	960,718,650.00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	960,718,650.00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55,718,800.00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	904,999,850.00
2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11,052,496,558.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11,052,496,558.00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11,052,496,558.00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,194,692,158.00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,157,153,148.00
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,157,153,148.00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374,484,750.00
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,654,750.00
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,173,500.00
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,980,000.00
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44,680,000.00
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,999,500.00
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239,997,000.00
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105,994,200.00
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	56,020,000.00
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,974,200.00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,473,820.00
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,974,620.00
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333,499,200.00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,586,240.00
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,583,020.00
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85,082,600.00
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,920,620.00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	39,693,600.00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	39,693,600.00
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	39,693,600.00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	682,014,800.00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77,000,000.00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77,000,000.00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	57,559,600.00

2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	57,559,600.00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	547,455,200.00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	386,801,200.00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	129,400,000.00
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	31,254,000.00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6,136,096,000.00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6,136,096,000.00
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30,560,000.00
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30,060,000.00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5,967,574,000.00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50,638,000.00
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	57,264,000.00
2.15.0.000.0013.0000	Dinas Perhubungan	15,162,818,199.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15,162,818,199.00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15,162,818,199.00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,638,829,399.00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,500,000.00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000.00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,756,506,064.00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,751,506,064.00
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000.00
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,500,000.00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182,530,000.00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	81,354,000.00
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76,176,000.00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620,397,000.00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54,452,000.00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84,995,000.00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,940,000.00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390,010,000.00

KODE	URAIAN O	KEGIATAN
1		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136,364,075.00
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	39,727,525.00
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96,636,550.00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,982,016,660.00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,643,442,260.00
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,800,000.00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,313,774,400.00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938,515,600.00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,836,800.00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	828,908,800.00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,770,000.00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,000,000.00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN L L U LINTAS DAN ANGKUTAN JA L N (L L J)	2,523,988,800.00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,327,500,000.00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30,000,000.00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	497,500,000.00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	800,000,000.00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	104,690,700.00
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	40,000,000.00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	64,690,700.00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	19,132,000.00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19,132,000.00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	528,732,000.00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,000,000.00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200,000,000.00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,000,000.00
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8,732,000.00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	293,050,000.00
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18,050,000.00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50,000,000.00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	200,000,000.00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25,000,000.00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	72,449,000.00
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	40,203,000.00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	32,246,000.00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	148,557,100.00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	108,559,100.00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39,998,000.00
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29,878,000.00
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	29,878,000.00
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,950,856,423.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,950,856,423.00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,782,556,473.00

N		RAM, KEGIATAN, DAN SUB	PLAFON ANGGARAN
			3
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,178,475,982.00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,361,342,614.00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,361,342,614.00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		437,089,500.00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		40,499,900.00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		79,655,200.00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		72,661,500.00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		39,543,900.00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		204,729,000.00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,170,472,218.00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45,808,218.00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,124,664,000.00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		209,571,650.00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50,894,200.00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		115,568,500.00
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		43,108,950.00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		3,228,480,491.00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3,228,480,491.00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		71,250,000.00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		224,999,745.00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik		190,000,000.00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media		1,775,901,946.00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		894,328,800.00
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		72,000,000.00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1,375,600,000.00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,200,000,000.00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1,200,000,000.00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		175,600,000.00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		72,000,000.00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		103,600,000.00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		114,299,950.00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		114,299,950.00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		114,299,950.00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		89,999,950.00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		10,800,000.00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		13,500,000.00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		54,000,000.00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		54,000,000.00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		54,000,000.00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		13,500,000.00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		40,500,000.00
2.17.2.07.3.32.15.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		5,454,188,990.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5,454,188,990.00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		646,555,900.00

M, KEGIATAN, DAN SUB N		PLAFON ANGGARAN 3
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	549,999,900.00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	549,999,900.00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	549,999,900.00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	96,556,000.00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	96,556,000.00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	66,556,000.00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4,807,633,090.00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,240,177,490.00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,480,000.00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,480,000.00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,590,792,015.00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,585,768,015.00
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,024,000.00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44,888,000.00
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44,888,000.00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873,343,675.00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,986,725.00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,447,950.00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138,916,000.00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,000,000.00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,340,000.00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571,653,000.00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119,663,200.00
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	119,663,200.00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304,161,200.00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,245,200.00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272,916,000.00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282,849,400.00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,014,050.00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129,835,350.00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000.00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	511,242,000.00
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	511,242,000.00
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	511,242,000.00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	56,213,600.00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	56,213,600.00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	56,213,600.00
2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,232,902,198.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9,232,902,198.00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9,232,902,198.00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,410,972,348.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000.00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000.00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,304,940,848.00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,303,440,848.00
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500,000.00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116,955,950.00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	82,402,000.00
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34,553,950.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624,619,350.00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,573,000.00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178,954,850.00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,242,400.00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71,000,100.00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,499,000.00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,350,000.00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,680,000.00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16,680,000.00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,343,311,200.00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,720,000.00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,460,000.00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,211,131,200.00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,002,965,000.00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,811,300.00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310,041,200.00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,112,500.00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	622,000,000.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	254,055,000.00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	254,055,000.00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	254,055,000.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	567,874,850.00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	567,874,850.00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	508,118,850.00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	59,756,000.00
2.22.3.26.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7,031,034,909.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	969,835,000.00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	969,835,000.00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	300,000,000.00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	300,000,000.00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	236,080,000.00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	236,080,000.00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	236,080,000.00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	149,798,000.00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,798,000.00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	149,798,000.00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	162,000,000.00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	162,000,000.00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	162,000,000.00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	121,957,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	121,957,000.00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	121,957,000.00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6,061,199,909.00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6,061,199,909.00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,929,624,129.00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,312,100.00
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,960,300.00
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,351,800.00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,203,325,929.00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,200,826,129.00
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,499,800.00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365,136,100.00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,149,200.00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,962,900.00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,132,000.00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,754,000.00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,300,000.00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231,838,000.00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,008,475,400.00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000.00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101,511,400.00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	901,464,000.00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,374,600.00
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,492,800.00
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233,171,800.00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,710,000.00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,896,585,000.00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200,000,000.00
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200,000,000.00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,696,585,000.00
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	400,000,000.00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350,000,000.00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	946,585,000.00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	234,990,780.00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	234,990,780.00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	54,943,280.00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	125,047,500.00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	55,000,000.00
2.23.2.24.1.01.18.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4,949,652,312.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4,949,652,312.00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,779,099,612.00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,464,451,678.00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,568,000.00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,209,000.00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,359,000.00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,508,846,628.00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,508,846,628.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	801,155,450.00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,111,000.00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313,207,450.00
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,843,400.00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82,497,100.00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,999,500.00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,497,000.00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,250,000.00
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	308,250,000.00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575,105,600.00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134,040,000.00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436,065,600.00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265,526,000.00
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,999,000.00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148,527,000.00
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000.00
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	314,647,934.00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67,704,534.00
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10,884,534.00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,820,000.00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246,943,400.00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	222,098,800.00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24,844,600.00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	170,552,700.00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	150,590,800.00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	83,990,900.00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	83,990,900.00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	9,999,900.00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	9,999,900.00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	56,600,000.00
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	56,600,000.00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19,961,900.00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	17,962,000.00
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	17,962,000.00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1,999,900.00
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1,999,900.00
3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15,739,364,577.00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15,739,364,577.00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15,739,364,577.00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,231,020,477.00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000.00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000.00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000.00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,721,349,298.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,721,349,298.00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810,571,610.00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,994,800.00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,000,000.00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,182,010.00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,999,800.00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000.00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599,995,000.00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192,498,700.00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	82,500,000.00
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,000,000.00
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,998,700.00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,081,029,369.00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,900,000.00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,998,169.00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944,131,200.00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422,571,500.00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,332,000.00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177,379,500.00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,860,000.00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	599,891,300.00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	399,887,500.00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	399,887,500.00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	200,003,800.00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	196,703,800.00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3,300,000.00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,014,875,000.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1,014,875,000.00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,014,875,000.00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	71,620,000.00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	71,620,000.00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	71,620,000.00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	821,957,800.00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	821,957,800.00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	510,140,000.00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	311,817,800.00
3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Peternakan dan Perkebunan	19,620,978,124.00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	19,620,978,124.00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19,620,978,124.00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,604,388,044.00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,600,000.00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,100,000.00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000.00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,370,742,871.00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,368,242,871.00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000.00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251,473,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27,000,000.00
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224,473,000.00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	683,058,500.00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,595,200.00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,463,600.00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38,067,700.00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449,932,000.00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300,412,950.00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	200,000,000.00
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,412,950.00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,266,501,923.00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,140,000.00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,109,123.00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,144,252,800.00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728,598,800.00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78,529,400.00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525,029,400.00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,040,000.00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,262,024,450.00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	105,653,000.00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	105,653,000.00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,156,371,450.00
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,079,672,700.00
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	76,698,750.00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7,727,950,000.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	7,727,950,000.00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7,727,950,000.00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	695,835,530.00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	695,835,530.00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	695,835,530.00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	49,990,600.00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	49,990,600.00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	49,990,600.00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100,040,000.00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,040,000.00
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	100,040,000.00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	180,749,500.00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	180,749,500.00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	180,749,500.00
3.31.3.30.0.00.21.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,296,478,923.00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11,296,478,923.00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6,178,956,300.00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5,200,000,000.00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,200,000,000.00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,200,000,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	134,999,700.00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	94,999,800.00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34,999,900.00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	59,999,900.00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,999,900.00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	39,999,900.00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	129,438,400.00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	129,438,400.00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	78,839,000.00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50,599,400.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	714,518,200.00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	714,518,200.00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	714,518,200.00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5,117,522,623.00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,978,137,623.00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,499,000.00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,499,800.00
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,499,800.00
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,499,800.00
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,499,800.00
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,499,800.00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000.00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,168,010,486.00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,165,510,686.00
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,499,800.00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626,008,440.00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,267,025.00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,533,215.00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,004,000.00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,668,200.00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449,536,000.00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,630,770.00
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	77,630,770.00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478,502,663.00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,225,863.00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400,276,800.00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611,486,264.00
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,640,000.00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240,578,600.00
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68,267,664.00
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	139,385,000.00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139,385,000.00

N		ATAN, DAN SUB	P L FON ANGGARAN
			3
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		49,979,600.00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		49,405,400.00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		40,000,000.00
4.01.s.06.2.10.22.0000	Sekretariat Daerah		57,90 ,s9s,04s.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN I WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		178,898,500.00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		178,898,500.00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		178,898,500.00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		178,898,500.00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		43,371,300.00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		135,527,200.00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		57,616,106,948.00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		57,616,106,948.00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		43,764,987,710.00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10,999,800.00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10,999,800.00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13,605,401,030.00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13,605,401,030.00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		45,377,000.00
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		45,377,000.00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		106,504,000.00
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		106,504,000.00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		6,036,070,600.00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		141,054,400.00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		377,596,600.00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2,350,926,600.00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		109,505,000.00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1,028,810,000.00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2,028,178,000.00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,285,946,134.00
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		750,000,000.00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		144,920,000.00
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		314,036,534.00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		68,989,600.00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8,000,000.00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,599,691,421.00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		14,700,000.00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2,123,198,221.00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		671,950,000.00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,789,843,200.00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,905,057,725.00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		642,430,000.00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2,319,622,400.00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		70,470,000.00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		908,637,500.00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		165,000,000.00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		798,897,825.00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900,969,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	708,969,000.00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168,000,000.00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24,000,000.00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4,390,225,600.00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,456,791,400.00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1,290,900,600.00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	642,533,600.00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	520,057,400.00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	178,829,600.00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	102,965,200.00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	87,736,000.00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59,849,600.00
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	90,677,000.00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4,358,688,000.00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1,749,140,000.00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,129,313,000.00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,480,235,000.00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12,598,652,338.00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	835,764,900.00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	188,213,200.00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	485,708,900.00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	161,842,800.00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10,716,336,738.00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,531,336,738.00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4,185,000,000.00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	719,200,000.00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	324,865,000.00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	128,879,100.00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	265,455,900.00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	327,350,700.00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	267,151,500.00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	60,199,200.00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,252,466,900.00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	222,554,700.00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	74,020,000.00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	55,685,700.00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	64,267,000.00
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	28,582,000.00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	398,999,900.00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	122,178,300.00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	38,213,600.00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	238,608,000.00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	541,781,100.00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	174,934,400.00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	286,943,700.00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	79,903,000.00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	89,131,200.00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	49,581,000.00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	39,550,200.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	108,592,600.00
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN	108,592,600.00
5.06.02	PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN	108,592,600.00
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	108,592,600.00
5.06.02.2.02.04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	108,592,600.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
4.02.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat DPRD	64,624,508,528.00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	64,624,508,528.00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	64,624,508,528.00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,786,311,528.00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,625,000.00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,575,000.00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,050,000.00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,606,557,756.00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,603,557,756.00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000.00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,000,000.00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	929,063,500.00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47,700,000.00
4.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	49,950,000.00
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53,917,500.00
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	639,400,000.00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138,096,000.00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,044,482,260.00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,745,400.00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876,288,860.00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,353,000.00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	655,590,000.00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91,330,000.00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33,135,000.00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302,040,000.00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206,097,658.00
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49,630,000.00
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	45,000,000.00
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111,467,658.00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,548,980,400.00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,450,000.00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137,928,000.00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,800,000.00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,318,802,400.00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,123,748,400.00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,766,800.00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356,731,600.00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10,000,000.00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260,300,000.00
4.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20,000,000.00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	366,950,000.00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25,933,410,554.00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24,767,230,554.00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	823,500,000.00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	342,680,000.00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	391,346,000.00
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	22,460,000.00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	100,000,000.00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	268,886,000.00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28,838,197,000.00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4,054,738,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20,000,000.00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,834,698,000.00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50,000,000.00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	150,040,000.00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4,301,070,000.00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	881,790,000.00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	881,790,000.00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	937,616,000.00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	937,616,000.00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	662,258,000.00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1,416,151,800.00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	101,062,000.00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100,571,000.00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	102,708,000.00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	106,687,900.00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	105,275,000.00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	125,485,000.00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	197,051,900.00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	577,311,000.00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3,939,127,200.00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2,372,459,000.00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	926,668,200.00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	228,000,000.00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	312,000,000.00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50,000,000.00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	50,000,000.00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4,412,016,000.00
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	134,200,000.00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50,000,000.00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4,227,816,000.00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	77,494,000.00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	77,494,000.00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	10,637,600,000.00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10,487,600,000.00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	50,000,000.00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50,000,000.00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50,000,000.00
5.01.5.05.0.00.24.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15,915,198,129.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	15,915,198,129.00
5.01	PERENCANAAN	14,423,563,649.00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,529,159,049.00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,999,000.00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,649,800.00
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,650,000.00
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,650,000.00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,650,000.00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,650,000.00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,649,200.00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,100,000.00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,424,019,736.00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,420,170,136.00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,199,600.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,650,000.00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358,580,600.00
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36,743,000.00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57,766,000.00
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9,999,900.00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	254,071,700.00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,332,911,700.00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,411,300.00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,485,400.00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173,014,000.00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,070,400.00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,408,600.00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,564,000.00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,070,000.00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	981,388,000.00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,500,000.00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	771,687,200.00
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	47,525,600.00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	584,661,600.00
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	99,000,000.00
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,500,000.00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	959,029,777.00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000.00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160,708,977.00
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770,020,800.00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671,931,036.00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59,635,240.00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341,516,800.00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,778,996.00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126,000,000.00
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,789,886,000.00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,068,328,400.00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28,920,000.00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	115,425,900.00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	65,030,000.00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	148,557,600.00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	29,280,000.00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	681,114,900.00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	272,075,000.00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	114,305,000.00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63,310,000.00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	94,460,000.00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	449,482,600.00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74,280,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	375,202,600.00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,104,518,600.00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	716,440,800.00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19,999,500.00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44,999,900.00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24,999,500.00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	14,999,800.00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,000,000.00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	79,999,000.00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39,997,100.00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	471,446,000.00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	576,603,100.00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26,462,200.00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8,778,800.00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	170,970,900.00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	234,600,800.00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20,206,200.00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10,342,800.00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13,250,000.00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	91,991,400.00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	811,474,700.00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,499,800.00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	151,438,800.00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	65,999,800.00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	131,999,900.00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43,999,900.00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	181,536,900.00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65,999,800.00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	120,999,800.00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,491,634,480.00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,491,634,480.00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	477,486,020.00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	109,135,680.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, KEGIATAN	=
1		
5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	59,595,860.00
5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	59,999,760.00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	199,428,660.00
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	49,326,060.00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	242,212,960.00
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	242,212,960.00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	771,935,500.00
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	85,227,320.00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	249,977,900.00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	286,027,880.00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150,702,400.00
5.02.0.00.0.00.2s.0000	Sasaran Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	259,853,845,987.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	259,853,845,987.00
5.02	KEUANGAN	259,853,845,987.00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	259,853,845,987.00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	259,853,845,987.00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	233,637,360,800.00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18,843,674,000.00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7,372,811,187.00
5.02.0.00.0.00.26.0000	Salada Pendapatan Daerah	19,251,195,235.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19,251,195,235.00
5.02	KEUANGAN	19,251,195,235.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,200,233,835.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000.00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,373,670,835.00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,368,670,835.00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000.00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,500,000.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	955,389,000.00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,999,000.00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,999,000.00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,998,000.00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000.00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599,993,000.00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343,590,600.00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58,507,500.00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,544,700.00
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,538,400.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,065,778,000.00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,998,000.00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,920,780,000.00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456,805,400.00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,440,000.00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315,665,400.00

N		N ANGGAAN
		3
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,700,000.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,050,961,400.00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,050,961,400.00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50,000,600.00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,000,200.00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	255,000,000.00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	275,000,000.00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	50,106,600.00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	320,854,000.00
5.02.00.0.00.27.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36,703,261,371.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	36,703,261,371.00
5.02	KEUANGAN	36,703,261,371.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,103,256,271.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,067,400.00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000.00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,067,400.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,007,111,889.00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,996,612,089.00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,249,900.00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,249,900.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,000,000.00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,000,000.00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,689,581,900.00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,800,000.00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311,112,000.00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,998,000.00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103,445,200.00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	241,754,700.00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,500,000.00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999,972,000.00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198,278,450.00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178,278,450.00
5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20,000,000.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,650,438,732.00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,900,000.00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213,441,132.00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,433,097,600.00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422,777,900.00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,735,900.00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314,242,000.00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,800,000.00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2,708,121,900.00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,268,066,100.00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131,972,200.00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	130,073,200.00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	53,376,400.00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	57,475,600.00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37,798,400.00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76,084,000.00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	399,752,800.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	173,126,800.00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50,000,000.00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	158,406,700.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	453,591,400.00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	42,397,800.00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28,254,000.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15,000,000.00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	14,999,800.00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100,000,000.00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40,000,000.00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	42,460,000.00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170,479,800.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	876,878,400.00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	39,548,000.00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	33,049,000.00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	74,653,800.00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	126,401,900.00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178,487,900.00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	29,999,800.00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	75,000,000.00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	77,700,000.00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	154,776,000.00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	45,688,000.00
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	41,574,000.00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	109,586,000.00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	109,586,000.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	891,883,200.00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	891,883,200.00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	40,356,000.00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	28,351,000.00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27,433,000.00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	27,906,500.00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	190,000,000.00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	18,411,500.00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	95,744,000.00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	194,999,000.00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	21,923,900.00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31,487,500.00

KODE	RAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	147,124,900.00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68,145,900.00
5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10,233,564,140.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10,233,564,140.00
5.03	KEPEGAWAIAAN	10,011,319,140.00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,557,783,275.00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,081,600.00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,435,200.00
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,440,000.00
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,440,000.00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,766,400.00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,883,909,491.00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,879,263,491.00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,518,000.00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,128,000.00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,640,000.00
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	8,640,000.00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	633,755,700.00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,830,200.00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178,718,700.00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,816,000.00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,806,800.00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321,584,000.00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,260,000.00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,260,000.00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640,333,784.00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140,484,984.00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494,848,800.00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343,802,700.00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,607,100.00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208,945,600.00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68,250,000.00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH	5,453,535,865.00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	989,643,400.00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	830,905,100.00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	107,246,300.00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	51,492,000.00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	863,604,000.00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	132,587,400.00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	731,016,600.00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2,527,265,665.00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	244,403,640.00
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2,034,260,000.00
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	45,948,300.00
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	49,650,000.00
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	143,003,625.00
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	10,000,100.00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,073,022,800.00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	979,621,000.00
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	23,177,200.00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	40,354,600.00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29,870,000.00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	222,245,000.00

5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	222,245,000.00
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	222,245,000.00
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4,988,000.00
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	217,257,000.00
6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	12,405,477,669.00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12,405,477,669.00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	12,405,477,669.00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,945,685,669.00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,288,600.00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,304,600.00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,984,000.00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,682,181,134.00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,682,181,134.00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211,851,000.00
6.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25,000,000.00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52,856,000.00
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16,504,000.00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117,491,000.00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588,443,300.00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,243,900.00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196,828,300.00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,035,100.00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000.00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,836,000.00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,081,600.00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30,081,600.00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958,082,405.00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151,439,205.00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801,643,200.00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470,757,630.00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,845,000.00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297,962,000.00
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30,960,000.00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,990,630.00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,076,632,000.00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,857,802,000.00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	189,860,000.00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	306,800,000.00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	84,996,000.00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	281,626,000.00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	681,420,000.00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	26,600,000.00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	286,500,000.00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218,830,000.00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35,780,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	183,050,000.00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	383,160,000.00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	59,260,000.00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12,260,000.00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	47,000,000.00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	323,900,000.00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	26,388,000.00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	28,752,000.00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85,780,000.00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	182,980,000.00
7.01.00.0.00.30.0000	Kecamatan Rambah	3,211,745,078.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3,211,745,078.00
7.01	KECAMATAN	3,211,745,078.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,946,833,078.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,284,930,826.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,284,930,826.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157,287,000.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,723,600.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,705,400.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,320,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,348,000.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,160,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,030,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,901,500.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,901,500.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450,511,352.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,720,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,603,752.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,370,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403,817,600.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,202,400.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,382,400.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,380,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,440,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,962,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,962,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,962,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240,632,000.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203,566,000.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3,540,000.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	185,000,000.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15,026,000.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37,066,000.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	37,066,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14,202,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14,202,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14,202,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,116,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,116,000.00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,380,000.00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	736,000.00
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Tambusai	3,329,243,568.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3,329,243,568.00
7.01	KECAMATAN	3,329,243,568.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,936,124,569.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,074,800.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,050,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499,800.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,186,047,228.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,184,751,228.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	648,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	648,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238,208,386.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,521,736.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,389,700.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,630,550.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,982,900.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,503,500.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,180,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,880,410.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9,646,560.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,233,850.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387,171,625.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,730,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,148,025.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349,293,600.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,742,120.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,772,120.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,500,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,470,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16,911,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16,911,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16,911,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	353,317,899.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62,783,030.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62,783,030.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	290,534,869.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,503,669.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	58,710,000.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224,321,200.00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1,000,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,890,100.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,890,100.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22,890,100.00
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Rokan IV Koto	3,109,186,935.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3,109,186,935.00
7.01	KECAMATAN	3,109,186,935.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,796,202,185.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,406,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,734,400.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	671,600.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,060,823,885.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,057,732,685.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,502,400.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,588,800.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157,258,500.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,681,700.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,473,000.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,031,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,592,800.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,640,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,840,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442,945,200.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,070,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413,875,200.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,768,600.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,083,000.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,965,600.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12,000,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,040,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,680,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21,179,600.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,179,600.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21,179,600.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	254,597,150.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	224,554,150.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,038,000.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	184,969,750.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33,546,400.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30,043,000.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30,043,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,688,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13,688,000.00

KODE	U	KEGIATAN	=
1			
7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13,688,000.00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23,520,000.00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	23,520,000.00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23,520,000.00
7.01.0.00.0.00.33.0000		Kecamatan Kepenuhan	3,430,962,943.00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	3,430,962,943.00
7.01		KECAMATAN	3,430,962,943.00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,084,789,943.00
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,695,600.00
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,153,600.00
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	542,000.00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,260,587,543.00
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,257,531,543.00
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,499,600.00
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,556,400.00
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,730,000.00
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13,730,000.00
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183,788,800.00
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi	2,904,000.00
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,814,800.00
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,256,000.00
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,520,000.00
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,754,000.00
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,540,000.00
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,335,400.00
7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	17,255,400.00
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,080,000.00
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509,589,800.00
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,900,000.00
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,782,600.00
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461,907,200.00
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,062,800.00
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,350,000.00
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,032,800.00
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,380,000.00
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,300,000.00
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25,959,000.00
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	25,959,000.00
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25,959,000.00
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	300,502,000.00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,361,000.00
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,361,000.00
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	280,141,000.00
7.01.03.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,015,000.00
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200,000,000.00
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66,126,000.00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,712,000.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,712,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15,812,000.00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,900,000.00
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Kunto Darussalam	3,143,505,087.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3,143,505,087.00
7.01	KECAMATAN	3,143,505,087.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,859,789,587.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,776,514,905.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,774,514,905.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,000,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263,511,400.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,865,000.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,165,200.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,544,800.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,270,400.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,166,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,500,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773,658,282.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,980,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,390,282.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754,288,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,105,000.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,075,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,030,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14,715,500.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,715,500.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14,715,500.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	155,000,000.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	155,000,000.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,000,000.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150,000,000.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,000,000.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,000,000.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,000,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,000,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,000,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14,000,000.00
7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Ujung Batu	4,201,963,500.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	4,201,963,500.00
7.01	KECAMATAN	4,201,963,500.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,738,487,100.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,200,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,200,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,156,068,713.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,156,068,713.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,768,700.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,056,800.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,398,700.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,656,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,979,200.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,796,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,882,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,348,100.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,348,100.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282,490,187.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,362,987.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243,127,200.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,611,400.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,211,400.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,400,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,484,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17,484,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17,484,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	442,392,400.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	367,591,600.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5,000,000.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85,000,000.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	277,591,600.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	74,800,800.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	74,800,800.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,600,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,600,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,600,000.00
7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Kabun	2,290,293,655.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2,290,293,655.00
7.01	KECAMATAN	2,290,293,655.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,244,154,655.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,517,200.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,592,400.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	962,400.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	962,400.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,805,540,505.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,803,615,705.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	962,400.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	962,400.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137,803,900.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,506,700.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,779,400.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,917,800.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,400,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,200,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,098,850.00

N		SU,	PLAFON ANGGARAN
			3
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16,098,850.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		220,763,400.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,500,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		16,725,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		202,538,400.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60,430,800.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		34,641,200.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7,489,600.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		1,620,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,340,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		11,340,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11,845,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11,845,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		11,845,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		18,429,000.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		18,429,000.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		18,429,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7,465,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		7,465,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7,465,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		8,400,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		8,400,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8,400,000.00
7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Tandun		1,724,188,600.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN		1,724,188,600.00
7.01	KECAMATAN		1,724,188,600.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,685,188,800.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,050,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,050,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,342,414,176.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,342,414,176.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		104,491,800.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3,291,600.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23,712,800.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20,175,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		26,112,400.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		31,200,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17,328,850.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		4,680,000.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12,648,850.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		180,508,488.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,960,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10,998,888.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		165,549,600.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39,395,486.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		32,884,800.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6,510,686.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14,499,800.00

KODE	URAIAN ORGANIS	KEGIATAN	=
1			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		14,499,800.00
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		14,499,800.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		24,500,000.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		24,500,000.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		24,500,000.00
1.01.0.00.0.00.3s.0000	Kecamatan Ra r bah Samo		1,962,366,202. 0
7	UNSUR KEWI L YAHAN		1,962,366,202:00
7.01	KECAMATAN		1,962,366,202.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1,885,035,302.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,726,850.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		703,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		524,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		499,850.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,362,985,126.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,361,579,126.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		703,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		703,000.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		16,298,000.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12,730,000.00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3,568,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		147,041,525.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi		6,636,925.00
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		38,857,200.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		45,198,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		27,418,400.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		945,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27,986,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		23,698,850.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		7,650,000.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8,048,850.00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		274,830,251.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,410,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17,898,651.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		253,521,600.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58,454,700.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		27,729,000.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25,445,700.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		2,000,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3,280,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11,724,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		11,724,000.00
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		11,724,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		47,460,000.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		47,460,000.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		47,460,000.00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,900,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,900,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,900,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7,246,900.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7,246,900.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,246,900.00
7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Rambah Hilir	1,915,821,500.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,915,821,500.00
7.01	KECAMATAN	1,915,821,500.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,867,499,800.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,873,200.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,010,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	443,200.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,546,980,170.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,544,882,370.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,048,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,049,800.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129,876,900.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,937,400.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,466,400.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,020,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,535,100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,718,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,798,850.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,798,850.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,154,880.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,988,480.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109,166,400.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,815,800.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,175,800.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,640,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11,379,100.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,379,100.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11,379,100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26,370,200.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	26,370,200.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	26,370,200.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,466,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,466,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,466,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,106,400.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,106,400.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,106,400.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Bangun Purba	1,434,232,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,434,232,000.00
7.01	KECAMATAN	1,434,232,000.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,402,353,000.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,206,400.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,103,200.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	581,600.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	521,600.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,024,385,000.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,022,107,800.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,174,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,103,200.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,425,500.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,681,000.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,060,800.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,940,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,783,700.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,640,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,320,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,250,000.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3,750,000.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,500,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,377,200.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,100,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,150,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240,127,200.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,708,900.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,248,000.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,800,900.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,460,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,200,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,850,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,850,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,850,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,381,000.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,381,000.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,381,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,548,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,548,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3,548,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,100,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,100,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,100,000.00
7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Tambusai Utara	1,799,540,185.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,799,540,185.00
7.01	KECAMATAN	1,799,540,185.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,729,141,185.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
	KABUPATEN/KOTA	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,427,200.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,142,400.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,142,400.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,142,400.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,137,701,215.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,134,696,415.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,502,400.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,502,400.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,910,000.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4,910,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142,506,000.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,016,400.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,785,600.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,316,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,208,000.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,640,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,540,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,985,170.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11,766,320.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,218,850.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301,946,000.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,130,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277,116,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,665,600.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,286,000.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,339,600.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6,000,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,640,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,400,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,715,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,715,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15,715,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,210,000.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,210,000.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,210,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,234,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,234,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,234,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,240,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,240,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20,240,000.00
7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1,917,907,911.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,917,907,911.00
7.01	KECAMATAN	1,917,907,911.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,802,888,411.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,594,400.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,045,700.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,049,700.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,499,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,338,914,250.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,334,371,250.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,043,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,500,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,523,500.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,949,800.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,114,700.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,960,000.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,170,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,714,000.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,245,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,370,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,055,100.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,055,100.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232,436,461.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,020,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,483,661.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218,932,800.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,364,700.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,813,800.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,168,900.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,500,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,882,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,828,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17,828,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17,828,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56,812,900.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56,812,900.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56,812,900.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,004,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22,004,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22,004,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,374,600.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,374,600.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18,374,600.00
7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1,465,617,677.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,465,617,677.00
7.01	KECAMATAN	1,465,617,677.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,385,352,177.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,791,800.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,049,800.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	890,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	801,521,252.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	799,421,552.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,049,800.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,049,900.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125,435,200.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,573,000.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,120,200.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,064,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,158,000.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,520,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,000,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,616,550.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15,750,000.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,866,550.00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321,423,375.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,520,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,398,575.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310,504,800.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,564,000.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,648,000.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4,500,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,400,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,016,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,752,600.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,752,600.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9,752,600.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46,691,000.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,691,000.00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	46,691,000.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,322,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13,322,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13,322,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,499,900.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,499,900.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,499,900.00
7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Pendalihan IV Koto	1,366,885,150.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,366,885,150.00
7.01	KECAMATAN	1,366,885,150.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,321,461,550.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,594,800.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,049,900.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,049,900.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,495,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	769,785,150.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	767,291,250.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,049,900.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,444,000.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,422,000.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17,422,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139,542,300.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,228,000.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,046,300.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,960,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,408,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32,900,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,401,500.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13,500,000.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,901,500.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309,025,400.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,190,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,125,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297,710,400.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,690,400.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,530,800.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,879,600.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,280,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,293,600.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,293,600.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,293,600.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35,130,000.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35,130,000.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35,130,000.00
7.01.7.01.7.01.42.0000	Kecamatan Bonai Darussalam	1,222,465,521.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1,222,465,521.00
7.01	KECAMATAN	1,222,465,521.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,156,788,521.00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,338,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,136,000.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	598,000.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	604,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	748,650,121.00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	747,206,721.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	709,000.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	734,400.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,388,000.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,692,000.00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	696,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164,644,300.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,207,900.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,032,000.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,609,600.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,564,800.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,750,000.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42,480,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,127,700.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5,627,700.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,500,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,699,600.00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,150,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,549,600.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,940,800.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,610,000.00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,990,800.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2,000,000.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,140,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,200,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,037,200.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,661,200.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13,661,200.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4,376,000.00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2,188,000.00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2,188,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24,599,800.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,599,800.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,599,800.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14,400,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14,400,000.00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14,400,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,640,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8,640,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,640,000.00
8.01.0.00.0.00.46.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,816,356,305.00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6,816,356,305.00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,816,356,305.00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,764,843,715.00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,817,112,465.00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,817,112,465.00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180,977,500.00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,812,000.00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,480,000.00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,450,000.00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,017,500.00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,218,000.00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168,220,550.00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168,220,550.00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387,732,400.00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,850,000.00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383,882,400.00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,800,800.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,600,800.00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157,200,000.00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	251,263,100.00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	251,263,100.00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	43,991,500.00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	207,271,600.00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2,899,683,990.00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2,899,683,990.00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	146,342,000.00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,636,641,990.00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	116,700,000.00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	231,186,000.00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	231,186,000.00
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	175,310,000.00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55,876,000.00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	163,345,900.00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	163,345,900.00
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	55,069,900.00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	67,936,000.00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40,340,000.00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	506,033,600.00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	506,033,600.00

KODE	URAIAN ORGANISASI, URUSAN, BIDANG, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN
1	2	3
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59,549,600.00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	64,984,000.00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	381,500,000.00
	TOTAL	1,672,718,799,868.00

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BANTUAN KEUANGAN.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang disajikan sebagai pendapatan pada BAB II, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Rencana Belanja Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD MURNI TA.2022	KUA TA.2023	SELISIH
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	951,083,932,583	1,212,365,418,161	261,281,485,578
5.1.01	Belanja Pegawai	627,413,031,065	708,298,363,330	80,885,332,265
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317,812,014,046	451,332,598,841	133,520,584,795
5.1.05	Belanja Hibah	5,327,285,472	49,928,455,990	44,601,170,518
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	531,602,000	2,806,000,000	2,274,398,000
5.2	BELANJA MODAL	65,558,483,851	200,499,535,720	134,941,051,869
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200,000,000	57,223,491,720	57,023,491,720
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,489,777,968	42,471,696,000	33,981,918,032
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,906,885,883	91,981,801,000	67,074,915,117
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31,391,820,000	8,772,547,000	-22,619,273,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	570,000,000	50,000,000	-520,000,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	43,042,736,016	18,843,674,000	-24,199,062,016
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43,042,736,016	18,843,674,000	-24,199,062,016
5.4	BELANJA TRANSFER	231,453,708,600	241,010,171,987	9,556,463,387
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,419,393,300	7,372,811,187	953,417,887
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225,034,315,300	233,637,360,800	8,603,045,500
	Jumlah Belanja	1,291,138,861,050	1,672,718,799,868	381,579,938,818

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2022, maka diasumsikan adanya SILPA tahun 2022 sebesar Rp. 8,600,000,000, yang bersumber dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang tahun 2022.

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tidak direncanakan.

Tabel 7. Rencana Pembiayaan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8,600,000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8,600,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8,600,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	8,600,000,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BAB VI. PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu. Nota Kesepakatan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.

Dokumen PPAS Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran ditahun 2023 secara baik. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.